

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta selaras dengan pokok bahasan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Prov.Sumbar merupakan Dinas Pendidikan yang baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsi organisasi selaras dengan bidang masing-masing pada Dinas Pendidikan Prov.Sumbar yang bertujuan agar tercapainya isu strategis dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, tata kelola sistem dan manajemen pendidikan agar terbentuknya SDM yang memiliki kualitas dan integritas dapat memiliki daya saing tinggi dan berkompentensi dimasa akan datang.
2. Penyusunan Anggaran Pendidikan sangat penting dilakukan agar terkelolanya anggaran pendidikan dengan baik dan dapat dialokasikan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan yang selaras dengan rencana dan sub kegiatan yang telah disusun melalui penyusunan anggaran. Untuk itu dalam proses penyusunan anggaran pendidikan harus mengikuti kalender anggaran yang telah dibuat oleh TAPD dan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Prosedur penyusunan anggaran dimulai dari perencanaan sampai dalam pelaksanaanya sudah memakai sistem komputerisasi sehingga dapat

mengoptimalkan kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran dan dalam penyusunan RKA penginputan data dilakukan dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dimana memudahkan pemerintah pusat dalam hal Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina umum daerah dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional dengan didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang tepat, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meningkatkan dalam pembangunan dan pencapaian target dan sasaran.

5.2 SARAN

Berdasarkan pada pembahasan penulis dapat mengemukakan saran berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat hendaknya lebih mengoptimalkan kinerja staf yang ahli dibidangnya masing-masing dan dalam setiap prosedur terkait dengan proses pengurusan, pengelolaan masalah pelayanan masyarakat berhubungan dengan pendidikan pada lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar sebaiknya lebih dijelaskan.
2. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat dan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Proses penyusunan Anggaran harus lebih memperhatikan prioritas anggaran yang akan dialokasikan sehingga apabila terjadinya keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan baik dengan lebih memprioritaskan anggaran yang dibutuhkan.

